



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARWANDI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA**
3. NHK : **864676**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.515.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 1.206 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. Tanah Seluas 1.755 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 790.000.000
4. Tanah Seluas 2.795 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
5. Tanah Seluas 5.353 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **294.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 29.500.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. MOTOR, HONDA ASTREA/C100 Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL



SENDIRI	Rp. 39.500.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp. ----
D. SURAT BERTHARGA		Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp. 15.002.000
F. HARTA LAINNYA		Rp. ----
Sub Total		Rp. 2.824.502.000
III. HUTANG		Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 2.824.502.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.